

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen regulasi, dokumen perencanaan pembangunan, laporan pemerintah, serta literatur yang relevan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerja sama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian merupakan bentuk paradiplomasi yang dijalankan dalam kerangka tata kelola pemerintahan bertingkat (*Multi-Level Governance*).

Kerja sama tersebut tidak berlangsung secara terpisah dari kebijakan nasional, melainkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui kerja sama internasional di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, dan pengembangan kapasitas daerah.

Pertama, kerangka kebijakan luar negeri yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama ini dibentuk melalui berbagai regulasi nasional yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan luar negeri. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat melalui mekanisme koordinasi, persetujuan, dan evaluasi. Dengan demikian, pelaksanaan paradiplomasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berlangsung dalam koridor kebijakan luar negeri Indonesia dan tidak terlepas dari prinsip negara kesatuan.

Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam strategi pembangunan daerah yang lebih operasional. Kerja sama dengan Provinsi Fujian dipilih tidak hanya karena adanya hubungan

historis dan sosial yang telah terjalin sejak lama, tetapi juga karena kesesuaian kepentingan ekonomi kedua wilayah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memanfaatkan peluang kerja sama internasional untuk mendukung peningkatan investasi, perdagangan, pengembangan industri, serta perluasan akses teknologi.

Ketiga, implementasi kerja sama menunjukkan adanya proses praktik paradiplomasi yang terorkestrasi pada berbagai sektor. Adaptasi tersebut tercermin dalam pengembangan kawasan industri melalui skema *Two Countries Twin Parks* (TCTP), penyederhanaan pelayanan investasi, penguatan kerja sama sektoral di bidang kelautan dan perikanan, serta penyesuaian kebijakan pendidikan vokasi untuk mendukung kebutuhan industri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik paradiplomasi yang terorkestrasi tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama, tetapi juga diwujudkan melalui perubahan kelembagaan, regulasi, dan program pembangunan yang mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.

Keempat, dinamika hubungan antara Jawa Tengah dan Fujian memperlihatkan keterlibatan berbagai aktor pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator pembangunan dan penghubung kepentingan ekonomi, sementara pemerintah pusat tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi. Di sisi lain, keterlibatan pelaku usaha, pengelola kawasan industri, dan perangkat daerah menunjukkan bahwa implementasi paradiplomasi tidak hanya bergantung pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga pada kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama *Sister Province* Jawa Tengah dan Fujian merupakan bentuk paradiplomasi yang relatif berhasil dalam mendukung pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya kerja sama investasi, penguatan hubungan ekonomi, perluasan kerja sama sektoral, serta kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebutuhan pembangunan dan dinamika kerja sama internasional.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, kerja sama *Sister Province* antara Jawa Tengah dan Fujian telah memberikan kontribusi positif terhadap investasi, pengembangan industri, dan transfer pengetahuan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar manfaat kerja sama dapat berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

### **1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperkuat posisi tawarnya dalam setiap kerja sama investasi dengan memastikan adanya klausul yang menjamin penggunaan tenaga kerja lokal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta transfer teknologi yang lebih konkret. Selain itu, keberadaan layanan *China Desk* perlu dioptimalkan tidak hanya sebagai fasilitator investasi, tetapi juga sebagai pusat informasi dan pemantauan risiko yang mendukung pengembangan sektor industri, pertanian, dan kelautan.

Di sisi lain, kerja sama dengan Fujian perlu diarahkan pada pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang melibatkan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan vokasi. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing dan memperkuat kapasitas inovasi daerah dalam jangka panjang.

## **2. Bagi Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, perlu mempertimbangkan penyederhanaan prosedur administrasi kerja sama luar negeri daerah tanpa mengurangi fungsi pengawasan dan perlindungan kedaulatan nasional. Digitalisasi proses perizinan dan penerapan mekanisme berbasis risiko (*risk-based approach*) dapat menjadi alternatif untuk mempercepat proses persetujuan kerja sama yang berorientasi pada investasi dan pembangunan ekonomi.

Selain itu, pemerintah pusat dapat memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi daerah yang memiliki rekam jejak tata kelola yang baik, selama kerja sama yang dilakukan tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak berkaitan dengan isu strategis seperti pertahanan dan keamanan.

## **3. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan melalui wawancara, observasi, atau studi kasus yang lebih mendalam untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan kelembagaan dari kerja sama Jawa Tengah–Fujian.

Selain itu, kajian komparatif dengan kerja sama *Sister Province* lain di Indonesia juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan praktik paradiplomasi yang terorkestrasi luar negeri di tingkat daerah. Dengan demikian, pemahaman mengenai praktik paradiplomasi dan *Multi-Level Governance* di Indonesia dapat berkembang secara lebih komprehensif.